

BAB II GAMBARAN UMUM

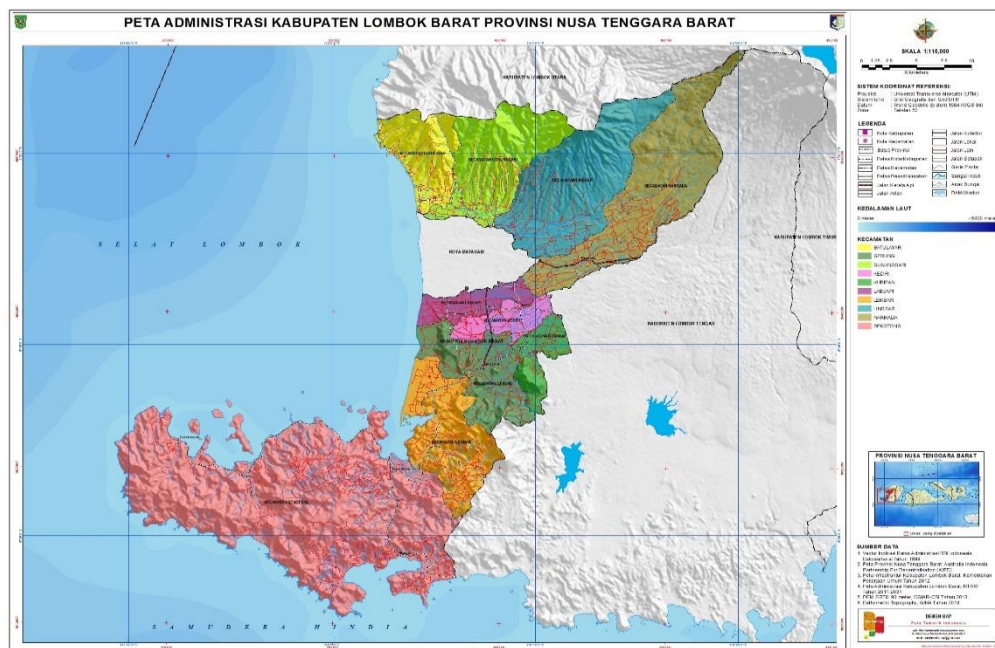
2.1 Gambaran Pemerintahan

Kabupaten Lombok Barat merupakan wilayah yang berada dibawah wilayah administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ibu kota Kabupaten Lombok Barat bertempat di Kecamatan Gerung. Kabupaten Lombok Barat memiliki visi pembangunan untuk tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Amanah, Sejahtera, dan Berprestasi dengan dilandasi nilai Patuh Patju”. Pelaksanaan dari visi tersebut diturunkan melalui lima misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, melayani serta berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan memiliki integritas.
2. Meningkatkan dan memantapkan akses infrastruktur wilayah dan pemenuhan layanan dasar secara berkeadilan.
3. Mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan keberpihakan pada masyarakat
4. Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya serta berdaya saing.
5. Meningkatkan dan memperkuat sinkronisasi dan sinergi pembangunan daerah untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

2.2 Kondisi Geografis

Kondisi geografis dari Kabupaten Lombok Barat penting untuk diketahui karena secara langsung maupun tidak langsung kondisi geografis memiliki pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan. Kabupaten Lombok Barat memiliki kondisi geografis wilayah yang terdiri atas daerah gugusan pegunungan, daerah berbukit-bukit dibagian selatan, dan daerah dataran rendah dibagian tengah yang membentang dari ujung timur ke ujung barat. Selain itu wilayah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia juga menyebabkan daerah ini terdiri dari gugusan-gugusan pulau kecil yang disebut gili. Pulau-pulau itu ada yang sudah berpenghuni dan masih ada yang tidak berpenghuni, bahkan banyak pulau yang belum memiliki nama (RPJMD Lombok Barat 2019-2024, 2019).



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Lombok Barat

Sumber : RPJMD Lombok Barat 2019-2024, 2019

Kabupaten Lombok Barat secara administratif memiliki luas wilayah 1053,92 km² yang terbagi kedalam sepuluh wilayah kecamatan yang mana Kecamatan Sekotong merupakan wilayah terluas, sementara Kecamatan Kuripan dan Kecamatan Kediri merupakan wilayah kecamatan dengan luas wilayah terkecil. Kabupaten Lombok Barat secara administrasi berbatasan langsung dengan Samudera Hindia disebelah selatan, Kabupaten Lombok Utara disebelah utara, Selat Lombok dan Kota Mataram di disebelah barat, dan Kabupaten Lombok Tengah disebelah timur (RPJMD Lombok Barat 2019-2024, 2019).

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat

Nomor	Kecamatan	Luas
1	Sekotong	529,38 km ²
2	Lembar	62,66 km ²
3	Gerung	62,3 km ²
4	Labuapi	28,33 km ²
5	Kediri	21,64 km ²
6	Kuripan	21,56 km ²
7	Narmada	107,62 km ²
8	Lingsar	96,58 km ²
9	Gunungsari	89,72 km ²
10	Batulayar	34,11 km ²

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2023

2.3 Kondisi Sosial Masyarakat

2.3.1 Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2023 mencatat jumlah penduduk sebesar 756.716 jiwa dengan perbandingan laki-laki sebesar 381.124 jiwa, sementara penduduk perempuan sebesar 375.592 jiwa. Persebaran penduduk terbesar berada di Kecamatan Narmada dengan 14,22% dan persebaran penduduk terkecil berada di Kecamatan Kuripan dengan 5,79% (BPS Kabupaten Lombok Barat, 2023)

2.3.2 Angka Perkawinan Penduduk

Persentase perkawinan berdasarkan usia perkawinan pertama penduduk perempuan di Kabupaten Lombok Barat pada kelompok umur 15-19 tahun tergolong cukup tinggi mencapai 50.20 persen.

Tabel 2.2 Kelompok Usia Kawin Pertama di Kabupaten Lombok Barat

Usia Kawin Pertama	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Total
<15	0.94%	5.97%	3.25%
15-19	46.18%	54.93%	50.20%
20-24	36.49%	32.22%	34.53%
25-29	11.15%	5.00%	8.32%
30-34	3.82%	1.62%	2.81%
35+	1.42%	0.27%	0.89%
Total	100.00%	100.00%	100.00%

Sumber : Susenas Maret 2022 dalam (BPS Lombok Barat, 2022)

**Tabel 2. 3 Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Lombok Barat
Berdasarkan Kecamatan tahun 2019-2021**

Nomor	Kecamatan	Angka Pernikahan Dini		Jumlah
		Suami	Istri	
1	Sekotong	43	163	206
2	Lembar	17	96	113
3	Gerung	33	136	169
4	Labuapi	26	121	147
5	Kediri	40	126	166
6	Kuripan	22	66	88
7	Narmada	35	120	155
8	Lingsar	37	159	196
9	Gunungsari	18	107	125
10	Batulayar	15	74	89
Total		286	1.168	1.454

Sumber : DP2KBP3A Lombok Barat, 2023

2.3.3 Indikator Pembangunan Manusia

Indeks Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang dapat digunakan dalam menilai kualitas sumber daya manusia penduduk di Kabupaten Lombok Barat. Nilai IPM Kabupaten Lombok Barat tahun 2022 yaitu sebesar 69,41, Adapun komponen pembentuk IPM mengalami peningkatan di Lombok Barat, sebagai berikut :

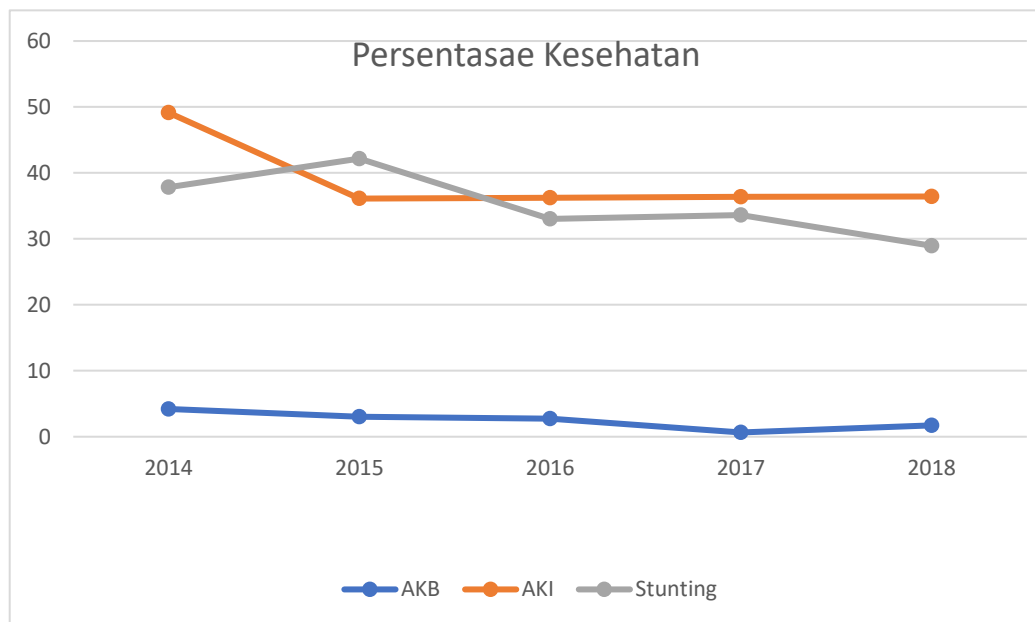
- a. Angka harapan hidup (AHH) masyarakat Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2022 sebesar 67,63 artinya setiap anak yang baru lahir memiliki harapan hidup sekitar 67 hingga 68 tahun.

b. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Lombok Barat tahun 2022 sebesar 13,96 tahun. Ini menunjukkan adanya peluang yang dimiliki anak usia 7 tahun untuk menamatkan pendidikan hingga lulus diploma I.

c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Lombok Barat tahun 2022 mencapai angka 6,60 tahun. Ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun keatas hanya menempuh pendidikan selama 6 tahun atau hingga SD kelas VI. RLS mencerminkan kondisi pendidikan beberapa tahun lalu dari gambaran pendidikan penduduk usia 25 tahun keatas hari ini.

d. Pengeluaran per kapita masyarakat yang disesuaikan telah mencapai Rp.11.367.000,- pada tahun 2018

2.3.4 Aspek Kesehatan



Gambar 2.2 Persentase Kesehatan berdasarkan AKB/AKI/Stunting

Sumber : Diolah berdasarkan data RPJMD Lombok Barat 2019-2024, 2019

Kesehatan menjadi faktor penting dalam pembangunan, penjagaan dan pemenuhan gizi dan kesehatan sejak ibu hamil merupakan upaya dasar yang dapat dilakukan untuk membangun generasi yang sehat. Adapun keterangan dari gambar diatas sebagai berikut :

1. Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah bayi yang meninggal saat berusia dibawah satu tahun untuk setiap seribu kelahiran hidup. Kabupaten Lombok Barat memiliki AKB yang trennya menurun secara fluktuatif, dari angka 4,21% di tahun 2014 kini menjadi 1,74% ditahun 2018.

2. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan gambaran jumlah ibu yang meninggal mulai dari proses kehamilan, saat persalinan, hingga setelah persalinan per seratus ribu kelahiran hidup. AKI di Kabupaten Lombok Barat tergolong cukup tinggi walaupun trendnya menurun dari 49,13% ditahun 2014 menjadi 36,43% ditahun 2018.

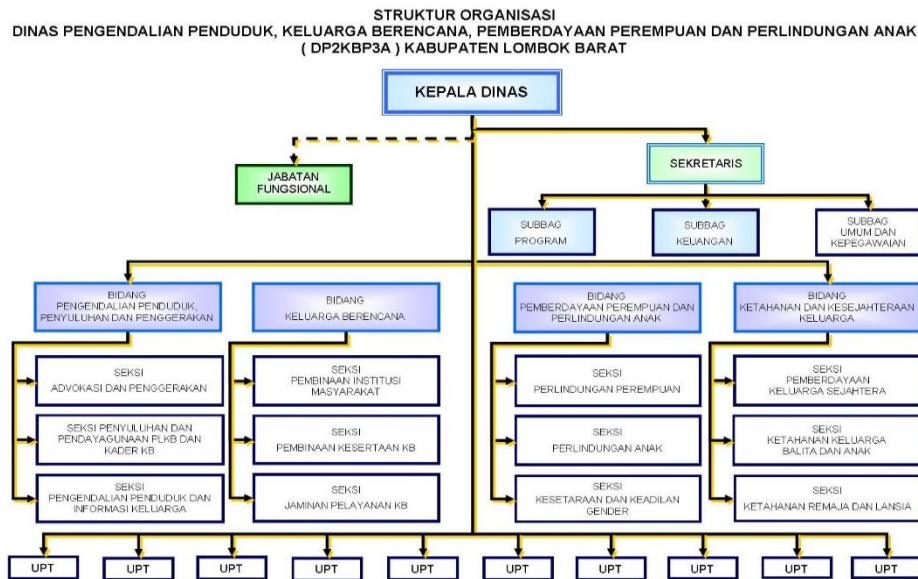
3. Kasus stunting dan balita kurang gizi merupakan masalah kesehatan yang harus ditangani karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang akan tumbuh dimasa yang akan datang. Stunting adalah masalah kesehatan akibat kurangnya gizi kronis bagi bayi sejak didalam kandungan sampai masa awal anak lahir yang mulai nampak setelah anak berusia 2 tahun dan menyebabkan kondisi tinggi badannya lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya. Angka stunting di Kabupaten Lombok Barat masih dalam kategori yang tidak sedikit, tahun 2014 angka anak stunting mencapai 37,85% dan menurun hingga mencapai angka 28,96% pada tahun 2018.

2.4 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)

2.4.1 Kedudukan dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) diatur rincian tugas, fungsi dan tata kerjanya berdasarkan Perbup Lombok Barat Nomor 70 tahun 2016. Pasal 2 ayat (1) Perbup ini mengatur mengenai kedudukan dinas ini, disebutkan dalam pasal tersebut bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung tugas dari kepada daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah (sekda). Pasal 2 ayat (2) menerangkan lebih lanjut bahwa kepala dinas mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinir, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas atau urusan pemerintah daerah dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya. Adapun yang termasuk didalam tugasnya diantaranya merumuskan kebijakan teknis, menyusun rencana strategis, program dan kegiatan, mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang yang dinaungi, melakukan pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bidang, melakukan penatausahaan dinas, dan membina UPT, serta melaksanakan tugas lainnya.

2.4.2 Struktur Organisasi



Gambar 2. 3 Stuktur Organisasi DP2KBP3A

Sumber : PPID Lombok Barat, 2023

2.4.3 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA)

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) terbagi atas empat bidang, salah satunya adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA). Pasal 26 Perbup Lombok Barat Nomor 70 tahun 2016 mengatur bahwa bidang ini memiliki tugas untuk melakukan peningkatan terhadap kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan bagi perempuan dan anak. Bidang ini memiliki fungsi antara lain ; menyusun kebijakan dalam bidang terkait, meningkatkan kapasitas perempuan didalam proses pembangunan, meningkatkan upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender didaerah, meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak dari kekerasan, melaksanakan koordinasi bersama unit kerja yang terkait, menyusun laporan hasil pelaksanaan bidang, dan tugas lainnya berkaitan dengan tugas bidang.

2.4.4 Unit Pelaksana Tugas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPT PPA)

UPT merupakan organisasi yang menjalankan tugas operasional dan/atau kegiatan teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. Pasal 6 ayat (1) Perbup Lombok Barat Nomor 13 tahun 2020 menerangkan bahwa UPT PPA memiliki tugas menjalankan kewenangan dalam pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak dengan fungsi diantaranya ; melayani dan mendampingi perempuan dan anak korban korban kekerasan, memberikan konseling, memediasi permasalahan, melaksanakan sosialisasi, memfasilitasi penguatan kelembagaan, menjalin kerjasama antar berbagai pihak, melakukan perencanaan operasional, menyusun laporan capain program, dan melaksanakan tugas lainnya berkanaan dengan fungsi unit.